



KORAN	HAL
Haluan	1&7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31)

Bulan

1 2 3 4 5

LHP PDTT BELANJA DAERAH PEMPROV SUMBAR 2021

BPK Masih Temukan Sejumlah Masalah

BPK Dari Halaman. 1

SELAMA ini, ULP selalu memenangkan tawaran terendah tanpa mempertimbangkan harga terkoreksi. Sehingga trennya itu, kontraktor tidak mencari uang, melainkan mencari pekerjaan. Mereka berlomba-lomba bersaing harga untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi eksekusinya banyak yang terbengkalai. Ada indikasi ke arah situ.

SUPARDI
Ketua DPRD Sumbar

PADANG, HALUAN -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah permasalahan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) Semester II Tahun 2021, mulai dari program bantuan yang tidak tepat sasaran hingga kelebihan pembiayaan belanja perjalanan dinas. Dalam 60 hari ke depan,

ruhan Belanja Daerah Semester II Tahun 2021 di Aula Gedung BPK Sumbar, Jumat (28/1) sore. Yusna mengungkapkan bahwa dalam LHP PDTT Pemprov Sumbar, Pemkab Tanah Datar, dan Pemko Sawahlunto masih ditemukan beberapa permasalahan. Untuk itu, diharapkan entitas yang diperiksa dapat memperbaiki kelemahan yang ada, menyatakan secara jelas apa yang harus diperbaiki, serta siapa yang memiliki wewenang untuk menginisiasi perbaikan yang direkomendasikan. Proses penindaklanjutan rekomendasi ini harus diserahkan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

"LHP ini adalah LHP dengan tujuan tertentu di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Bertujuan untuk menilai apakah belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang signifikan, masih ditemukannya realisasi bantuan yang tidak tepat sasaran. Juga masih ada kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, yang selalu jadi temuan klasik tiap tahun. Semoga dengan penyerahan LHP ini dapat memberikan dorongan dan motivasi kepatuhan belanja daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengucapkan terima kasih kepada pemeriksa BPK Sumbar yang memberikan arahan administratif yang benar terhadap kinerja pemerintah daerah agar dicapai peningkatan kinerja dengan kualitas yang lebih baik.

"Ada beberapa catatan yang mesti dijadikan bahan perbaikan. Artinya, kami punya ruang dar waktu untuk melakukan perbaikan. Ini jadi masukan bagi kami. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang sudah melakukan pemeriksaan belanja di provinsi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kami untuk penyempurnaan," katanya.

Siapkan Langkah Tindak Lanjut

Terpisah, Plt Inspektur Sumbar, Betty Vetrica menyebutkan, terhadap permasalahan yang terdapat pada masing-masing temuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam LHP BPK tersebut, Inspektorat Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut.

Pertama, akan menyusun Instruksi Gubernur yang ditujukan kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk setiap temuan. Kedua, akan melakukan pembahasan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut, termasuk melakukan koordinasi dengan BPK jika ditemui kendala dalam pemenuhan rekomendasi.

Ketiga, Pemprov akan menyampaikan perkembangan tindak lanjut kepada BPK untuk kemudian ditelaah kembali oleh BPK atas kekurangan atau kelengkapan bukti-bukti tindak lanjut yang disampaikan. Terakhir, akan terus melakukan pemantauan tindak lanjut oleh Inspektorat Sumbar, dan jika perlu akan mengeluarkan surat teguran kepada OPD yang lambat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Setelah menyampaikan Surat Instruksi Gubernur kepada OPD terkait, kami tentunya akan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan

aksi tindak lanjut dari OPD yang bersangkutan," kata Sekretaris Inspektorat Sumbar itu saat dihubungi *Haluan*, Minggu (30/1).

Terkait dengan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sesuai dengan rekomendasi BPK, Inspektorat, ujarnya, akan melakukan pemuliharaan atas kerugian daerah yang telah diakibatkan dengan mendorong OPD terkait untuk dapat segera mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Termasuk memproses sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan atas bantuan yang tidak tepat sasaran, sesuai rekomendasi BPK, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat serta proses pelaksanaan kegiatan dimaksud. Hasilnya akan dijadikan bahan perbaikan ke depan.

"Dalam hal ini juga termasuk evaluasi atas proses perencanaan, tim pemberi bantuan, dan penunjukkan objek penerima bantuan," ucapnya.

Mesti Lebih Tegas

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, meski belum melihat catatan LHP PDTT secara menyeluruh, pihaknya tetap menyoroti masih adanya sejumlah permasalahan dalam belanja daerah Sumbar.

"BPK baru menyampaikan poin-poin besarnya saja, seperti belanja perjalanan dinas, hibah yang di luar peruntukkan, tender yang tidak selesai, pekerjaan yang telah selesai namun belum dibayarkan, dan seterusnya. Tapi untuk detailnya, mungkin nanti," katanya.

Menurutnya, sebagian besar temuan tersebut berupa tender yang masih belum diatur secara profesional serta pekerjaan yang putus kontrak karena waktu sudah habis. Dengan temuan ini, ia berharap ke depan evaluasi lebih difokuskan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumbar.

"Selama ini, ULP selalu memenangkan tawaran terendah tanpa mempertimbangkan harga terkoreksi. Sehingga trennya itu, kontraktor tidak mencari uang, melainkan mencari pekerjaan. Mereka berlomba-lomba bersaing harga untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi eksekusinya banyak yang terbengkalai. Ada indikasi ke arah situ," kata politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Selain itu, menurut Supardi, bisa jadi juga penyebabnya lantaran kontraktor itu sendiri yang tidak cakap dan profesional. Uang muka diambil di awal tahun, tetapi proyek tidak dikerjakan atau dikedur di akhir tahun. "Ada juga yang kasusnya seperti itu," ujarnya lagi.

Namun prinsipnya, apapun temuan BPK, DPRD akan tetap melakukan tindak lanjut dalam bentuk panitia khusus (pansus). Ia berharap, dengan LHP PDTT ini, ada ketegasan Gubernur Sumbar untuk mewanti-wanti kelompok-kelompok kerja (pokja) yang ada. Sebab, komitmen pemerintah di awal-awal tahun sudah mulai pengerjaan tender. Tapi kenyataannya, eksekusinya tidak seperti itu. Baru pertengahan tahun proyek dikerjakan.

"Kami berharap ke depan, sebagai perbaikan pada bulan-bulan pertama 2022 ini, tender-tender sudah diproses. Dan harus ada peringatan dari Gubernur kepada OPD maupun ULP agar tidak terlambat dan bisa lebih disiplin," ucapnya menutup. (h/dan/yes)

Pemprov Sumbar diminta melakukan perbaikan sekaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi mengatakan, selain Pemprov Sumbar, permasalahan serupa juga masih ditemukan dalam LHP PDTT dua kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto.

"Hasil pemeriksaan ini telah sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana BPK memiliki kewenangan untuk melakukan PDTT, yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif," katanya saat acara Penyerahan LHP PDTT Kupa-

>> BPK hal 07